

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

-----, Undang-Undang *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 8 Tahun 2011, LN No.70. Tahun 2011, TLN.5226

-----, Undang -Undang *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UUNomor 15 Tahun 2019, No. 183. LN Tahun 2019 TLN. 6398.

-----, Undang-Undang *tentang Kekuasaan Kehakiman*.UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157. TLN. 5076.

-----, Undang-Undang *Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 98. TLN. 4316.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/ PUU- IX/ 2011.

B. Buku

Asshiddiqie, Jimmly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2016.

- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Benny, K Harman. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). 2013
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Fatkurohman, dan Dian Aminudin, Sirajuddin. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: PT.Citra AdityaBakti. 2004.
- Fuady, Munir. *Teori Negara hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusa Media. 2016.
- Manan Munafrizal. *Penemuan Hukum Oleh MK*, Bandung: Mandar Maju Marbun, SF.dkk.2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press. 2013.

Muhajir Nugroho, Rahmat, dan Agus Setiadi. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV. Global Press. 2018.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. 2010.

Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (edisi II)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Teguh, Prasetyo., dan Barkatullah, Abdul Hali. *Filsafat, teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali pers. 2016.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.

C. Lain-lain

Arianto, Henry. “Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Volume 9 Nomor 3.2012.

Eko Nugroho, Wahyu. “Implementasi Trias Politica dalam system”. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/285984- implementasi-trias->

politica-dalam-sistem- 30eb0941.pdf, pada 11 Desember 2020, pukul 14.16WIB.

Esfandiari, Fitria, dkk. “positive legislatire Mahkamah Konsittusi diIndonesia”
Jurnal Hukum No 1. 2014.

Fachrurrozi, Muhammad. *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Fakultas Hukum. Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. 2020.

Fandi Denisatria, Mohammad. “Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature dan positive legislature”. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c062fbc83162/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i/>, pada tanggal 31Maret 2021, pukul 20.10 WIB.

Haryono. “Penegakan Hukum berbasis Nilai keadilan substantif”, *Jurnal Hukum progresif*, Vol. 7, No. 1.2019.

Hsb, Ali Marwan. “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2. 2016.

Hutomo, Dimas. “Lembaga yang berwenang menguji Perda terhadap Undang-undang”.

diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c8dca1840120/lembaga-yang-berwenang-menguji-perda-terhadap-undang-undang/>, pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 19.35 WIB.

Kartono. “Politik Hukum Judicial Review”, *Jurnal Dinamika Hukum Vol.11*. 2011.

Katadata, “Indonesia peringkat ke 4 negara berpenduduk terbanyak dunia”,

diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak>, pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 21.17 WIB.

Kurnia, Abi Jam’an. “Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”,

diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c99e6f4c009f/aturan-seputar-hukum-acara-mahkamah-konstitusi/>, pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 22.11 WIB.

Kurniawati, Ika, dan Lusylia. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislature dalam pengujian Undang-undang

terhadap Undang-undang dasar 1945”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 10 No.1. 2018.

Kusumasari, Diana. “Apakah penggugat dapat memilih siapa yang hendak di gugatnya”. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e98042938638/apakah-penggugat-boleh-memilih-siapa-yang-hendak-digugatnya-/pada> tanggal 13 Maret 2021, Pukul 16.29 WIB.

Lailam, Tanto. “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.2. No. 1. 2014.

Laksono, Fajar, dkk. “Implikasi dan Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)” *Jurnal Kepaniteraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2013.

Mahrus Ali, Muhammad. “Konstitusional dan Legalitas Norma dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.1. 2015.

- Manan, Bagir. “Beberapa Catatan tentang Penafsiran, Artikel dalam *Varia Peradilan*”, *Majalah Hukum Tahun XXIV*. 2009.
- Maruarar Siahaan. “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan tantangan”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 4. 2010.
- MD, Mahfud. “Rambu pembatas dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi”. dalam *Jurnal hukum No. 4 Vol. 16*. 2009.
- MKRI. “Sejarah dan pembentukan, kedudukan serta kewenangan Mahkamah Konstitusi. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1768>, pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 16.32 WIB
- Nurhayati, Syara. “Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislature dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-undangdasar 1945”, *JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2*. 2015.
- Qamar, Nurul.” Kewenangan Judicial Review Mahakamah Konstitusi”, dalam *Jurnal Konstitusi*. 2012.
- Samburi, Fista Prilia. 2013.” Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Lex Administratum, Vol.i/No.2*.

Sutisyo, Bambang. 2010. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan kehakiman di Indonesia", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6.

Tanpa nama. "Kedudukan dan kewenangan MK RI" diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4>, pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 15.21 WIB.

Wawancara dengan Fitriani Ahlan Sjarif, selaku pengajar hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Ahli Perundang-undangan, tanggal 29 April 2021 di Hotel Swiss Bellin Kota Bogor.

Wiryanto, "Mahkamah Konstitusi dalam siste ketatanegaraan RI", dalam Bimbingan teknis hukum acara penyelesaian hasil pemilu 2019, diakses pada 22 Januari 2020, pukul 17.20 WIB

Wulandari, Widati., dkk. "Laporan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam melakukan Judicial Review terhadap Undang- undang Pidana yang mengakibatkan perubahan Norma dalam hukum pidana materil ditinjau dari asas legalitas". dalam *Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*. 2019.

Nugraha, Xavier, dkk. “Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislature menjadi positive Legislature, *RechtIdee* Vol. 15, No. 1. 2020.

Zaky, Muhammad. ” Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Germany Federal Constitutional Court dan Implikasinya”, *Jurnal Transnasional* Vol.11 No 1. 2016.